

BAB V

PENUTUP

Bab ini bertujuan untuk menjelaskan analisa tesis yang ditujukan dalam menjawab pertanyaan penelitian dan membuktikan hipotesa. Proses analisa yang berangkat dari pertanyaan penelitian dimulai dari proses penggambaran variasi doktrin pertahanan dalam dua periode, yaitu periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965) dan Orde Baru (1966-1998) melalui identifikasi operasi-operasi militernya yang disebabkan oleh dua hal, yaitu *strategic culture* Indonesia dan struktur ancaman.

Penelitian ini telah berhasil mengidentifikasi, memetakan serta melakukan analisa terhadap penggelaran operasi-operasi militer yang digelar baik yang sifatnya ofensif maupun defensif serta yang jenisnya internal maupun eksternal pada periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965) maupun periode Orde Baru (1966-1998).

Penelitian ini telah berhasil membuktikan dua hipotesa yang disusun di bagian awal penelitian sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian. Pertama, membuktikan bahwa variasi doktrin pertahanan Indonesia terjadi karena adanya perubahan *strategic culture* utama Indonesia, kedua, membuktikan perubahan struktur ancaman juga turut mempengaruhi terjadinya variasi pada doktrin pertahanan Indonesia.

5.1. Kesimpulan

Doktrin pertahanan merupakan prinsip-prinsip dasar yang memberikan arah bagi pengelolaan sumber daya pertahanan untuk mencapai tujuan keamanan nasional baik dalam masa damai maupun dalam masa perang. Dalam masa damai, doktrin pertahanan digunakan sebagai penuntun dan pedoman bagi penyelenggaraan pertahanan negara dalam menyiapkan kekuatan dan pertahanan untuk menghadapi ancaman baik yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Sedangkan pada keadaan perang, doktrin pertahanan memberikan tuntutan dan pedoman dalam mendayagunakan segenap kekuatan nasional dalam upaya pertahanan guna menyelamatkan negara dan bangsa dari ancaman yang dihadapi.

Karakter suatu Doktrin Pertahanan apakah sifatnya ofensif atau defensif dapat ditelusuri dari karakteristik dari operasi-operasi militernya, karena operasi militer merupakan implementasi dari strategi dan panduan yang telah dirumuskan di dalam doktrin pertahanan. Operasi militer yang digelar pada periode Demokrasi Terpimpin sebagian besar didominasi oleh unsur-unsur ofensif yang menekankan pada motif dan tujuan yang agresif, yang bertujuan untuk melucuti kekuatan musuh (*disarm*) dengan mengandalkan *first-strike attack*, mobilisasi pasukan yang tinggi, serta mengkombinasikan tiga matra untuk mencapai kemenangan dan pertempuran yang cepat (*high-speed warfare*). Sementara operasi militer yang digelar pada periode Orde Baru sebagian besar didominasi oleh unsur-unsur defensif yang menekankan pada penolakan serangan musuh (*denial*) dengan karakteristik perang berlarut (*long war*), proteksi wilayah serta tindakan pencegahan (*pre-emptive*). Dari karakteristik operasi-operasi militer di atas dapat diidentifikasi karakter doktrin pertahanan Indonesia yang mengalami variasi pada dua periode tersebut.

Variasi doktrin pertahanan Indonesia pada dua periode tersebut dipengaruhi oleh perubahan *strategic culture* Indonesia. *Strategic culture* merupakan hasil interpretasi organisasi militer terhadap kondisi politik domestik yang sering disebut sebagai *political-military subculture*. *Political-military subculture* meliputi perdebatan para elit sipil tentang isu-isu militer dimana dalam perumusan keputusannya elit sipil mengacu pada peran yang dimainkan kalangan militer di masa lalu. Keputusan ini diinterpretasikan oleh organisasi militer sehingga menjadi *strategic belief*.

Pilihan antara diplomasi atau penggelaran militer merupakan dua *strategic culture* utama Indonesia yang didasari oleh pemikiran Sutan Syahrir dan Tan Malaka sehubungan dengan cara-cara perjuangan Indonesia menghadapi Belanda. Kedua *strategic culture* utama Indonesia tersebut diinterpretasikan oleh organisasi militer sehingga menghasilkan *strategic belief* yang kemudian diimplementasikan ke dalam penggelaran operasi-operasi militernya. Pada periode Demokrasi Terpimpin, *strategic culture* Indonesia adalah opsi militer. Pilihan ini diinterpretasikan oleh TNI sebagai suatu kondisi dimana mereka percaya bahwa mereka memiliki kemampuan tempur (*strong states*). *Strategic belief* ini ditambah

dengan karakter fungsional organisasi militer yang secara inheren memilih doktrin ofensif, kemudian diimplementasikan ke dalam operasi-operasi militer yang karakteristiknya ofensif. Sedangkan pada periode Orde Baru, *strategic culture* Indonesia adalah opsi diplomasi yang kemudian diinterpretasikan oleh TNI sebagai suatu kondisi dimana mereka tidak memiliki kemampuan tempur (*weak states*). Kepercayaan ini kemudian diimplementasikan ke dalam suatu perumusan strategi pertahanan berlapis dan penggelaran operasi-operasi militer pada periode Orde Baru yang sebagian besar didominasi karakteristik defensif.

Perubahan struktur ancaman pada periode Demokrasi Terpimpin dan periode Orde Baru mempengaruhi hubungan sipil militer Indonesia yang juga turut mempengaruhi variasi doktrin pertahanan Indonesia. Pada periode Demokrasi Terpimpin intensitas ancaman tinggi baik internal maupun eksternal. Ancaman eksternal meliputi sengketa Irian Barat dan Konfrontasi Malaysia, sedangkan ancaman internal meliputi pemberontakan-pemberontakan bersenjata seperti DI/TII dan Republik Maluku Selatan. Kondisi ini menempatkan periode Demokrasi Terpimpin pada kuadran Q3 yang menghasilkan hubungan sipil militer yang berada pada level 'buruk' dan berpotensi memunculkan pemimpin yang tidak memiliki ketertarikan terhadap masalah-masalah militer. Pertentangan antara Soekarno yang merupakan elit sipil dan Nasution yang merupakan elit militer mengenai rencana penggelaran pasukan di Irian Barat menggambarkan bagaimana hubungan sipil militer pada periode ini. Intensitas ancaman yang tinggi baik internal maupun eksternal memaksa digelarnya operasi-operasi militer yang ke luar batas nasional dan sifatnya agresif yaitu pendudukan kekuasaan di wilayah musuh seperti Komando Mandala dan Komando Siaga. Penggelaran operasi militer yang didominasi unsur-unsur ofensif mencerminkan karakter doktrin pertahanan Indonesia yang memberikan arahan pengelolaan sumber daya pertahanan yang sifatnya ofensif.

Periode Orde Baru dengan intensitas ancaman eksternal yang rendah yaitu aneksasi Timor Portugis dan intensitas ancaman internal yang cukup tinggi meliputi penumpasan PKI, penumpasan gerakan-gerakan separatis bersenjata seperti GAM di Aceh dan OPM di Papua menempatkan hubungan sipil militer periode Orde Baru pada kuadran Q4 yaitu pada level "paling buruk". Ancaman

internal yang intensitasnya tinggi membuat orientasi militer sepenuhnya ke dalam (*inward*). Kecenderungan ini dapat menimbulkan keterlibatan militer ke dalam politik melalui kebijakan-kebijakan yang menyangkut ranah profesionalismenya.

Kondisi ini dapat dilihat pada periode Orde Baru dimana militer Indonesia telah terlibat sepenuhnya ke dalam politik dengan kedudukan mereka di Parlemen, Kabinet maupun posisi-posisi strategis. Militer pada periode ini sudah tidak lagi profesional karena telah melampaui fungsi utamanya yaitu pertahanan dengan terlibat dalam politik yang sebenarnya adalah ranah sipil. Ancaman internal yang tinggi dengan orientasi ke dalam secara langsung membuat penggelaran operasi-operasi militer sepenuhnya diarahkan untuk menghadapi ancaman internal yang sifatnya hanya di dalam batas nasional saja meliputi penjagaan kedaulatan dan operasi-operasi kamdagri. Penggelaran operasi militer yang didominasi sepenuhnya dalam rangka perlindungan wilayah dan tidak keluar batas nasional menunjukkan operasi militer tersebut lebih menekankan pada unsur-unsur defensif dimana hal ini merefleksikan doktrin pertahanan Indonesia yang memberikan arahan yang sifatnya defensif.

Terjadinya perbedaan karakteristik operasi-operasi militer pada periode Demokrasi Terpimpin dan periode Orde Baru disebabkan oleh : pertama, adanya perubahan *strategic culture* Indonesia dari yang sebelumnya memilih opsi militer berubah menjadi lebih menekankan pada opsi diplomasi sebagai sarana penyelesaian masalah hal ini diinterpretasikan oleh organisasi militer sehingga menghasilkan *strategic belief* yang juga turut berubah dari sebelumnya *middle-capability* menjadi *weak states*. Perubahan *strategic belief* ini berdampak terhadap perubahan karakteristik operasi militer yang sebelumnya ofensif menjadi defensif pada kedua periode tersebut. Kedua, adanya perubahan struktur ancaman dimana pada periode Demokrasi terpimpin struktur ancaman tinggi baik internal maupun eksternal, sementara pada periode Orde Baru struktur ancaman lebih didominasi oleh ancaman internal. Kedua faktor ini menyebabkan terjadinya perubahan karakteristik operasi militer dari ofensif ke defensif pada dua periode tersebut. Hal ini merepresentasikan variasi doktrin pertahanan pada kedua periode tersebut karena operasi militer merupakan hasil implementasi dari arah, tuntunan dan strategi pertahanan yang dirumuskan di dalam doktrin pertahanannya.

5.2. Proyeksi

Doktrin pertahanan yang merupakan pedoman dan tuntunan pengelolaan sumber daya pertahanan untuk mencapai tujuan keamanan nasional termasuk di dalamnya pengembangan strategi pertahanan dalam kaitannya dengan penggelaran operasi-operasi militer dan postur pertahanan ke depannya hendaknya dirumuskan dengan mempertimbangkan proyeksi dan orientasi yang keluar batas nasional (*outward-looking*). Saran ini didasari oleh dua argumen, pertama, negara yang berada dalam suatu sistem internasional dengan doktrin yang *outward-looking* akan selalu berupaya untuk merespon lingkungan strategisnya sehingga strategi pertahanannya akan selalu berkembang sejalan dengan dinamika lingkungan strategis baik kawasan maupun global hal ini akan berimplikasi kepada pengembangan doktrin pertahanan sehingga stagnasi strategi pertahanan yang berimplikasi terhadap stagnasi doktrin pertahanan dapat dihindari. Kedua, doktrin yang *outward-looking* akan membuat orientasi militer sepenuhnya keluar batas nasional sehingga militer dapat berkonsentrasi sepenuhnya pada misi-misi yang sesuai dengan ranah profesionalismenya. Dengan menghindarkan keterlibatan militer ke dalam politik domestik, doktrin yang *outward-looking* juga berpotensi menjamin hubungan sipil-militer yang lebih sehat dan kondusif.

5.3. Rekomendasi Penelitian

Untuk penelitian lanjutan mengenai subjek doktrin pertahanan, penulis menyarankan agar :

1. Memperdalam lagi analisa tentang *strategic culture* Indonesia pada periode Reformasi. Analisa tentang *strategic culture* Indonesia pada periode Reformasi yang memiliki perbedaan yang signifikan dengan periode-periode sebelumnya akan diikuti oleh penemuan *strategic belief* Indonesia yang baru.
2. Memperdalam analisa mengenai struktur ancaman yang kini didominasi oleh ancaman-ancaman yang bersifat non-konvensional dan trans-nasional serta hubungan sipil-militer pada periode Reformasi dimana Dwifungsi sudah dihapuskan serta TNI sudah tidak lagi terlibat dalam politik praktis. Analisa

mengenai struktur ancaman yang lebih kompleks dan hubungan sipil-militer pada periode Reformasi serta pengaruhnya terhadap doktrin pertahanan akan menghasilkan fenomena baru yang menarik untuk dikaji.

